

BAB III

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati sebagai Gerakan Sosial

Secara umum gerakan sosial memiliki berbagai definisi karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Giddens, 2006). Definisi senada dirumuskan oleh seorang teoritis terkemuka Sydney Tarrow (1998, p. 4), gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dengan interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang.

Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial (Tarrow, 2006).

Tidak semua bentuk perlawanan politik yang bertebaran di berbagai belahan dunia bisa disebut sebagai gerakan sosial.

Dalam bab ini, penulis akan memulai pembahasan mengenai salah satu bagian dari gerakan sosial yang bernama Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP). Penulis akan mengidentifikasi bahwa aliansi tersebut adalah termasuk kedalam suatu gerakan sosial. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan identifikasi, akan digunakan beberapa indikator kepada Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati merupakan bagian dari gerakan sosial.

Empat properti dasar dalam konsep gerakan sosial menurut Tarrow (1998), yaitu:

1. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi *focal point* (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem represif, tantangan

kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Bahkan di negara-negara demokrasi liberal, orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan suatu gerakan mempertontonkannya melalui kata-kata, corak pakaian, dan perilaku pribadi yang mencirikan tujuan kolektif mereka.

Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati merupakan gerakan yang muncul dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan sekelompok masyarakat Pati terhadap kontestasi pemilihan kepala daerah yang hanya menghadirkan satu pasang calon kepala daerah yang notabene adalah calon petahana. Pak Sutiyo sebagai penggagas untuk dibentuknya Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati merasa prihatin dengan hanya ada satu pasang calon yang maju dalam Pilkada Kabupaten Pati. Dan menurutnya banyak sekali kader-kader partai politik juga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memimpin Kabupaten Pati namun terganjal oleh politik transaksional dalam proses pencalonan yang dilakukan oleh partai politik dengan calon petahana. Pak Sutiyo juga menyatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam artian menginginkan hadirnya calon lain selain calon petahana. Hal ini mengindikasikan adanya aspirasi yang tidak tersalurkan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sutiyo yaitu demokrasi pati adalah demokrasi mati suri.

Melihat kondisi tersebut Pak Sutiyo dan masyarakat Kabupaten Pati lainnya menggagas untuk melakukan dukungan terhadap kotak kosong dan menghidupkan demokrasi di Kabupaten Pati dengan membentuk aliansi yang dinamai Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati sebagai upaya mengimbangi lawannya dalam Pilkada pati yakni calon petahana Haryanto-Syaiful Arifin. Sebagai tindakan dalam mendukung kotak kosong, mengimbangi calon petahana, dan menghidupkan demokrasi di pati AKDPP melakukan upaya pendidikan politik kepada masyarakat, yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian Pilkada dengan pasangan calon tunggal, pengertian tentang pemilihan kotak kosong dan mengkampanyekan kepada masyarakat pati agar tidak golput dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sutiyo:

“kami sangat prihatin ketika calon Pilkada dimana masyarakat pati banyak yang sebetulnya yang mencalonkan diri menjadi pimpinan kepala daerah Kabupaten Pati, namun demikian tidak ada satu pasangpun calon yang lolos kecuali pasangan haryanto syaiful arifin yang notabene adalah petahana. Partai politik saya anggap gagal karena saya melihat transaksional partai politik sehingga rekrutmen pun dan kaderpun sehingga sampe dikalahkan dengan berbagai cara. Saya katakan kami sangat prihatin sekali untuk memperlihatkan, bahkan memperlihatkan dimana warga masyarakat sebetulnya ada konsep menginginkan sekali adanya perubahan.”

“Nah apakah dalam konteks ini tidak ada suatu kepekaan partai sendiri. Bagaimana menyikapi padahal kader-kader berpotensi luar bisa banyak, tetapi sekali lagi tidak ada satupun dari kader partai yang diakomodir oleh partai. Oleh karena itu kami terdorong untuk mengimbangi karena semua dari calon yang mendaftar gagal total akhirnya satu petahana, untuk

mengimbangi sudah barang tentu kami menggagas dengan adanya keseimbangan kolom kosong itu. Saya mensosialisasikan untuk menyadarkan masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif jangan sampai golput (Sutiyo, 2017).”

AKDPP menganggap sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum ditingkat daerah yaitu KPUD Kabupaten Pati masih belum menyeluruh, tidak menyentuh kepada semua kalangan masyarakat. Sebab sosialisasi yang dilakukan melalui media televisi lokal dan radio yang dirasa kurang efektif karena tidak semua masyarakat pati membuka saluran televisi lokal tersebut.

“Sosialisasi dari KPUD sudah ada tapi memang belum menyeluruh, ya kan sosialisasinya lewat tv. tv itupun tv lokal kalo seperti di pati kan Simpang TV, terus lewat radio-radio lokal juga (Kardono, 2017).”

Bahkan Pak Sutiyo menyatakan bahwa pihak penyelenggara Pilkada (KPUD Kabupaten Pati) justru tidak mendukung upaya yang dilakukan AKDPP. Sosialisasi yang dilakukan tidak mendapatkan respon baik dari pihak penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pati.

“saya katakan penyelenggara (KPUD) justru ingin sekali untuk membungkam kami untuk mematikan demokrasi. kami sosialisasi ada ajakan untuk menyadarkan masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif jangan sampai golput. Nah ajakan-ajakan ini tidak malah tidak ditanggapi dengan baik oleh penyelenggara bahkan menjadi musuh kami ini (Sutiyo, 2017).”

Dengan berbagai alasan diatas AKDPP berinisiasi untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan AKDPP bukan

hanya untuk masyarakat perkotaan tetapi juga dilakukan kepada masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Pati. Hal itu dilakukan karena AKDPP merasa bahwa masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum mengetahui tentang Pilkada dengan pasangan calon tunggal dan pengertian tentang pemilihan kotak kosong, bahkan anggapan dari masyarakat bahwa kotak kosong merupakan suara tidak sah.

Untuk memperoleh perhatian dari pihak lawan kubu yang dilawan dan menciptakan konstituen yang diwakili, AKDPP melakukan penyebaran gambar-gambar yang menjelaskan dan mengkampanyekan kotak kosong kepada masyarakat di media sosial. Selain di media gambar-gambar tersebut juga dicetak dalam bentuk baliho, kaos dan stiker dengan dana yang terbatas yang diperoleh dari iuran para relawan AKDPP.

“jadi digambar-gambar kita juga banyak sekali kita pasang gambar yang intinya jangan golput, pasti ada kata-katanya jangan golput, pilih kotak kosong untuk demokrasi yang lebih baik atau bagaimana yang penting tidak menjelek-jelekkan paslon (Kardono, 2017).”

Gagalnya partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidikan politik menjadikan sebab munculnya calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pati tahun 2017. Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap calon petahana juga mendorong masyarakat untuk bergabung dalam AKDPP untuk mendukung kotak kosong. Serta peran penyelenggara

Pilkada di Kabupaten Pati yang kurang maksimal dalam mensosialisasikan kotak kosong menjadi sebab AKDPP untuk turun tangan dalam menjalankan peran tersebut.

Untuk memperoleh perhatian dari pihak lawan kubu yang dilawan dan menciptakan konstituen yang diwakili, AKDPP melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, menyebarkan gambar-gambar yang menjelaskan dan mengkampanyekan kotak kosong kepada masyarakat di media sosial. Selain di media gambar-gambar tersebut juga dicetak dalam bentuk baliho, kaos dan stiker dengan dana yang terbatas yang diperoleh dari iuran para relawan AKDPP.

Bentuk- Bentuk Tantangan Kolektif yang dilakukan AKDPP:

1.1 Sosialisasi dan Kampanye

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai pemilihan kepala daerah dengan adanya kolom kosong atau sering disebut kotak kosong sebagai alternatif pilihan jika tidak setuju dengan pasangan calon, menimbulkan pandangan di kalangan masyarakat tersebut bahwa memilih pasangan calon merupakan satu satunya pilihan. Adanya sosialisasi yang salah mengenai hal tersebut yang menurut beberapa relawan, pemahaman seperti itu memang sengaja dibentuk oleh pihak lawan. Menurut Pak Kardono, di masyarakat pedesaan sosialisasi yang salah sudah dilakukan oleh aparat desa bahkan sampai di tingkat rukun tetangga (RT). Dengan adanya hal tersebut para relawan AKDPP melakukan sosialisasi ke

pedesaan untuk membenarkan pemahaman masyarakat. Seperti dijelaskan Pak Kardono:

“selama ini kita mencoba melakukan sosialisasi ke masyarakat yang jauh dari perkotaan atau di pedesaan tetapi setiap ada aksi dan sebagainya selalu digagalkan oleh pihak-pihak dari tim paslon sendiri maupun dari kpu maupun dari kepolisian satpol pp dan sebagainya. Tidak semua masyarakat mengetahui sahnya kotak kosong, jika kita tidak memang masuk dari rumah ke rumah atau sosialisasi dari orang perorangan itu rata-rata mereka tidak tahu. “*Wah aku nek ning kotak kosong berarti nko desaku ora mbok bangunkan seperti ini*”, jangankan dari aparat desa, dari RT, RW, bahkan sampai itu dikondisikan untuk kemenangan paslon dan memang sudah dijadikan timses (Kardono, 2017).”

Untuk melakukan sosialisasi dan kampanye, para relawan AKDPP membuat berbagai macam kegiatan seperti :

1.1.1 Penggalangan Dana

Dalam melakukan gerakan yang dilakukan AKDPP tentu membutuhkan dana untuk membiayai berbagai macam kegiatannya. Karena gerakan ini merupakan gerakan yang muncul dari masyarakat secara spontan dalam menanggapi momentum Pilkada, secara keuangan AKDPP tidak mempunyai dana yang jelas sebelumnya. Namun para relawan berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pati secara sukarela. Selain untuk mengumpulkan dana, kegiatan ini juga merupakan kegiatan menunjukkan eksistensi AKDPP dan sosialisasi kepada masyarakat karena kegiatan ini secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Pendanaan Aliansi kawal demokrasi Pilkada pati berasal dari kantong pribadi para relawan yang mendukung kotak kosong. Dari awal melakukan kegiatan menggunakan dana hasil iuran anggota yang dikumpulkan dengan cara sukarela. Hal itu diungkapkan oleh salahsatu relawan kotak kosong:

“Kita pun dari awal sudah iuran, iuran sak duwene duwit, seikhlasnya, kita juga pernah mau mengadakan seni ketoprak, itupun sambatan karena memang yang punya ketoprak sendiri adalah pak sutiyo sebagai ketua aliansi jadi itu pun dihalang-halangi oleh KPUD (Kardono, 2017).”

Selain itu pendanaan juga berasal dari hasil sumbangan masyarakat pati yang dikumpulkan oleh para relawan dengan cara turun kejalan. Berapapun uang yang diberikan oleh masyarakat diterima baik oleh AKDPP, AKDPP tidak mematok nominal sumbangan yang ditarik. Pada dasarnya masyarakat memberikan sumbangan karena simpatik terhadap kegiatan yang dilakukan AKDPP.

“...gerakannya seperti kemarin-kemarin itu sampai di jalan-jalan, jadi memang minta dukungan sama publik, jadi mereka menyawer dua ribu, seribu, lima ribu, lima puluh ribu bahkan seratus ribu pun itu terserah pada warga masyarakat itu sendiri yang memberikan bantuan simpatik itu (Sutiyo, 2017).”

Selain mengumpulkan dana dengan cara iuran relawan dan sumbangan dari masyarakat, untuk menghemat pengeluaran dana dalam melaksanakan kegiatannya, AKDPP menggunakan sumberdaya dari para relawan itu sendiri. Seperti saat

melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, untuk keperluan akomodasi saksi, pengacara, dll ketua AKDPP memberikan pemahaman kepada para saksi dan pengacara yang bersangkutan.

“kepentingan kami untuk akomodasi ke jakarta, untuk melakukan sidang, untuk pemahaman, untuk memberikan bantuan kepada saksi, untuk pendampingan dengan teman-teman lawyer, dan itu saya terus berikan suatu pemahaman. Gerakannya seperti kemarin-kemarin itu sampai di jalan-jalan, jadi memang minta dukungan sama publik, jadi mereka menyawer dua ribu, seribu, lima ribu, lima puluh ribu bahkan seratus ribu pun itu terserah pada warga masyarakat itu sendiri yang memberikan bantuan simpatik itu (Sutiyo, 2017).”

1.1.2 Bakti sosial

Melihat kondisi di beberapa daerah Kabupaten Pati yang terkena musibah banjir pada musim hujan, bertepatan pada masa sebelum Pilkada. Para relawan AKDPP mengadakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir.

“kita melakukan bakti sosial, di sini kan daerah rawan banjir. Bulan- bulan ini kan sering rawan banjir karena cuaca dan daerahnya memang daerah banjir (Sutiyo, 2017).”

Para relawan AKDPP memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir secara langsung. AKDPP mengumpulkan sumbangan dari masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada korban banjir berupa sembako. Sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan di posko

AKDPP dan didistribusikan ke daerah yang terkena musibah banjir seperti di Kecamatan Jakenan, puncak wangi, dan juwana. Seperti dijelaskan:

“Di pati kan ada banjir to, relawan bareng2 datang dan menyantuni korban banjir. Kita memberikan santunan. sumbangan-sumbangan dari masyarakat di posko AKDPP itu penuh itu. Kita dipercaya masyarakat, mereka berbondong-bondong nganterin bantuan berupa beras, minyak goreng, sembako. Daerah jakenan, puncak wangi, juwana. Kita beberapa kali melakukan kunjungan (Hakim, 2017).”

AKDPP melakukan kegiatan sosial sebagai arena sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah. Dengan melalui kegiatan sosial AKDPP berinteraksi langsung dengan masyarakat hal ini dapat menunjukkan eksistensi gerakan dan mengkampanyekan kotak kosong kepada masyarakat.

1.1.3 Alat peraga

a. Baliho

Untuk melakukan publikasi dengan menarik perhatian masyarakat, AKDPP membuat spanduk dan baliho. Baliho dan spanduk digunakan sebagai media mengkampanyekan kotak kosong kepada masyarakat di Kabupaten Pati. Pemasangan baliho hanya dilakukan di beberapa kecamatan dan dengan jumlah yang terbatas karena minimnya dana yang dimiliki AKDPP.

“Kita gunakan beberapa alat peraga, waktu itu ada spanduk terus pamflet-pamflet, juga baliho di kecamatan-kecamatan. tapi ya gitu, kita gak banyak (itqon).”

Untuk pembuatan baliho dilakukan oleh para relawan dengan cara swadaya. Proses pembuatan yang menggunakan keahlian para relawan yang bisa menyablon baliho dan spanduk dapat menekan biaya produksi sehingga dana yang dikeluarkan tidak banyak. Selain membuat sendiri, AKDPP juga memanfaatkan percetakan teman dari relawan untuk membantu dalam pembuatannya. Seperti yang dijelaskan Mas Imam:

“bikin baliho, paling kalo nyablon kita bisa nyablon sendiri. dari banner kita punya temen percetakan yang mungkin bisa membantu juga kan jadi lebih murah(imam).”

Namun dalam mengkampanyekan dengan menggunakan baliho, seringkali mendapat tentangan dari pihak lawan dan aparat seperti satpol pp. Penurunan baliho yang dibuat AKDPP pernah terjadi di kecamatan juwana dan dukuhseti yang dilakukan oleh satpol pp. namun untuk mempertahankan baliho, para relawan memasang kembali baliho yang diturunkan oleh aparat satpol pp. Pengrusakan juga pernah terjadi baliho yang dipasang di depan posko AKDPP. Seperti yang diceritakan mas imam:

“Cuma kalau baliho kita pasang pasti tidak sampai dua hari sudah dicopot, yang nyopot itu satpol pp dengan

alasan kita tidak mempunyai ijin reklame, kita dibenturkan dengan ijin reklame. Padahal itu bukan iklan, padahal dari KPU sendiri itu kan seharusnya yang mensosialisasikan malah tidak mensosialisasikan. Sempet di juwana, dukuh seti temen2 relawan membuat baliho tapi diturunkan oleh satpol pp. Tapi kadang ada temen2 yang memasang lagi baliho yang dicopot(imam).”

Penggunaan baliho merupakan sebuah hal yang wajar dalam menghadapi moment Pilkada. Dalam teknis kampanye melalui baliho adalah cara yang paling umum dilakukan. AKDPP juga menggunakan baliho sebagai media mengkampanyekan kotak kosong , melalui baliho AKDPP memberi tahu bahwa ada nya kotak kosong sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati 2017.

Penggunaan baliho yang berlebihan akan menjadikan sampah visual. Dengan keterbatasan dana, AKDPP membuat baliho sebagai alat peraga dengan jumlah yang terbatasjuga. Sehingga tujuan AKDPP membuat baliho tidak menjadi kegiatan yang mengganggu masyarakat.

Melalui alat peraga baliho, gerakan ini telah berhasil menarik perhatian dan mengganggu pihak lawan karena dengan adanya pencopotan yang dilakukan oleh aparat bahkan ada pengrusakan terhadap baliho yang dipasang didepan posko AKDPP, menunjukkan ada pihak yang terganggu dengan hadirnya alat peraga tersebut.

b. Pamflet

Pembuatan selebaran atau pamflet juga digunakan AKDPP sebagai media untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan kotak kosong. Relawan AKDPP membuat selebaran yang memuat negative campaign berupa penjabaran tentang prestasi buruk calon petahana selama memimpin pemerintahan di Kabupaten Pati. Relawan mengetahui bahwa *black campaign* merupakan kegiatan yang dilarang, sehingga mereka sangat berhati-hati dalam membuat tulisan opini dan mencari alternatif lain untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan dalam Pilkada.

Selebaran tersebut disebar di beberapa tempat yang menurut para relawan adalah tempat strategis seperti warung-warung dimana masyarakat sering berkumpul agar terbaca oleh masyarakat. Selain itu, relawan juga membagikan selebaran melalui media sosial seperti facebook dan instagram agar jangkauannya lebih luas untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Imam:

“Selain itu juga membuat selebaran. selebaran kita sebar di warung-warung dimana tempat berkumpulnya orang-orang biar bisa dibaca oleh orang-orang yang ada disitu(imam). Saya sempat membuat selebaran black campaign kalau istilah pemilu ya, black campaign kan tidak diperbolehkan, Cuma kita bikin selebaran tentang negative campaign. Negative campaign kan

diperbolehkan, istilahnya prestasi jelek petahana. Sempat saya sebar di medsos biar masyarakat mengenal. Dalam membuat opini kita harus berhati-hati. Dalam opini yang kita buat harus sesuai fakta. Karena kalau kita membuat black campaign bisa menjadi boomerang buat kita. Kita selalu wanti2 jangan sampai black campain (Imam, 2017).”

Opini publik yang baik adalah yang mampu mengarahkan cara pandang khalayak terhadap sebuah objek sesuai kehendak pembuat opini. Bisa dengan berbagai cara penyebaran opini, seperti dengan menggunakan media massa melalui publikasi.

Untuk menyampaikan tulisan opini berisi negative campaign yang dibuat, AKDPP melakukan publikasi salah satunya dengan mencetak opini berupa selebaran atau pamflet. Melalui pamflet, AKDPP menyebarkan informasi yang penyajiannya disetting dahulu dengan memuat konten yang dapat menjatuhkan citra lawan politiknya. Propaganda melalui pamflet yang dicetak maupun dibagikan melalui media sosial mencoba mengarahkan opini publik untuk mengubah tindakan dan harapan dari target individu.

1.1.4 Media sosial

Relawan juga membagikan selebaran melalui media sosial seperti facebook dan instagram agar jangkauannya lebih luas untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Relawan AKDPP membuat selebaran yang memuat negative campaign

berupa penjabaran tentang prestasi buruk calon petahana selama memimpin pemerintahan di Kabupaten Pati.

“Kita menyuarakan lewat facebook atau media sosial. saya sempat membuat selebaran black campaign kalau istilah pemilu ya, black campaign kan tidak diperbolehkan, Cuma kita bikin selebaran tentang negative campaign. Negative campaign kan diperbolehkan, istilahnya prestasi jelek petahana. Sempat saya sebar di medsos biar masyarakat mengenal (Imam, 2017).”

Relawan mengetahui bahwa *black campaign* merupakan kegiatan yang dilarang, sehingga mereka sangat berhati-hati dalam membuat tulisan opini dan mencari alternatif lain untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan dalam Pilkada. Dalam membuat opini, ada beberapa isu yang dijadikan sebagai bahan negative campaign seperti permasalahan PKL, Toko modern berjejaring, taman kota yang terbengkalai, penambangan pegunungan kendeng, jual beli jabatan, dan lain-lain. Ada relawan yang membuat opini tersebut lalu teman-teman relawan yang lain membantu membagikan tulisan yang dibuat melalui media sosial.

“Dalam membuat opini kita harus berhati-hati. Dalam opini yang kita buat harus sesuai fakta. Karena kalau kita membuat black campaign bisa menjadi boomerang buat kita. Kita selalu wanti2 jangan sampai black campaign lebih baik kita negative campaign. Dari saya membikin opini, isu beberapa negative campaign itu saya bikin nanti temen-temen saya suruh sebar. Nanti dikembangkan oleh temen2 sendiri. Seperti isu soal PKL, toko modern, soal taman kota yang terbengkalai, banyak

sekali, jual beli jabatan juga yg kemarin sempet ditangkap (Imam, 2017).”

Selain dengan tulisan, relawan AKDPP juga menggunakan gambar untuk menepis pemahaman yang salah di masyarakat mengenai kotak kosong. Melalui gambar juga, para relawan mengajak kepada masyarakat untuk tidak golput dalam Pilkada melalui tulisan yang dimuat pada gambar yang disebar di media sosial. Gambar yang disebar di media sosial seperti facebook bertuliskan ajakan ”jangan golput, pilih kotak kosong untuk Pati yang lebih baik” juga dicetak dalam bentuk kaos. Pak Kardono menceritakan :

“Ya itu tadi kita lewat gambar mas, jadi gambarnya tidak menjelek-jelekan paslon. jadi digambar-gambar kita juga banyak sekali kita pasang gambar yang intinya jangan golput, pasti ada kata-katanya “jangan golput, pilih kotak kosong untuk demokrasi yang lebih baik” atau bagaimana yang penting tidak menjelek-jelekan paslon (Kardono, 2017).”

Awal mula sebelum AKDPP terbentuk, masyarakat yang peduli dan kritis dengan kondisi menjelang Pilkada pati 2017 sudah sering berkomunikasi melalui kolom komentar di media sosial facebook. Dalam berita yang dimuat di media sosial facebook mengenai permasalahan di pati. Dari situ, masyarakat mempunyai inisiatif membuat grup di facebook untuk mewadahi masyarakat yang mendukung kotak kosong. Dengan adanya grup tersebut mereka berdiskusi dan saling berbagi informasi. Seperti yang dijelaskan Mas Imam:

“Namanya sekarang era media sosial, kemungkinan kita sosialisasi yang lebih mudah untuk menggalang suara itu melalui media sosial. Langkah pertama kita ya itu membuat grup relawan kotak kosong itu. Dulu sebelum membuat grup kita komunikasi dulu. dulu kita sering ketemu di koment, di status apa, ada postingan apa kita koment. Dari situ kita berinisiatif membuat grup. Melalui grup istilahnya kita bisa mempunyai ruang tersendiri untuk berdiskusi dan untuk menyuarakan apa yang kita suarakan (Imam, 2017).”

Melalui media sosial, AKDPP mempublikasikan informasi kegiatannya untuk menarik masyarakat sehingga bergabung dengan gerakan yang dilakukan. Ketika masyarakat sudah banyak yang tertarik, AKDPP membentuk kordinator relawan di wilayah-wilayah Kabupaten Pati. Seperti yang dijelaskan pak Itqon:

“Di media sosial kita publikasikan, di media massa juga kita publikasikan sehingga di situlah masyarakat mulai antusias, awalnya kan begini sebelum kita deklarasi itu kan masyarakat gak ngerti nih. Kemudian masyarakat mengetahui dan kita jaring kelompok-kelompok masyarakat yang tertarik dengan kita, dari situlah kita bentuk struktur di tingkat kecamatan dan kordinator di wilayah dapil masing-masing dan sampai terbentuklah di tingkat ranting (Hakim, 2017).”

Media sosial merupakan salah satu jenis media elektronik yang bisa digunakan sebagai sarana sosialisasi politik, khususnya menyasar kalangan anak muda. Sebagai sarana sosialisasi, media sosial dapat memberikan edukasi bagi generasi muda terkait pentingnya memberikan hak suara dan terlibat aktif dalam pesta demokrasi.

Untuk menyampaikan tulisan opini berisi negative campaign, menyebarkan gambar-gambar yang bersifat ajakan, menyediakan ruang diskusi masyarakat, bahkan mengorganisir massa, AKDPP menggunakan media sosial sebagai alatnya. Media sosial yang sering digunakan AKDPP adalah facebook.

1.1.5 Door to door

Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim gerakan, AKDPP melakukan gerakan *door to door* atau menyambangi langsung pintu ke pintu dengan mengajak masyarakat untuk mendukung kotak kosong. Dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Mendatangi masyarakat secara langsung ke daerah-daerah dengan mengadakan acara nongkrong atau diskusi dengan anak-anak muda bahkan mendeklarasikan dukungan terhadap kotak kosong.

“Door to door, kemudian kita angkat isu2 kebijakan yang tidak strategis, kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, kita kampanyekan ke seluruh masyarakat. sistemnya lebih banyak sebenarnya di door to door ketimbang ke medsos. Kita melakukan deklarasi di kampung-kampung walaupun saya mendapatkan tekanan yang kuat. Di kampung kampung Kita adakan kongkow-kongkow bersama anak-anak muda, rame-rame kita deklarasikan dukungan terhadap kotak kosong (Hakim, 2017).”

Acara yang dilakukan disertai dengan acara musik dari relawan yang bisa bermain musik. seperti yang dilakukan relawan yang memperjuangkan penolakan penambangan pegunungan kendeng.

“kita juga melakukan kegiatan hiburan dengan acara musik jagong. Bikin semacam jagong komunitas, dari temen2 yang mengikuti isu kendeng kan banyak yang bisa bermusik, jadi kita kumpul kita musik2an, njagong,diskusi seperti acara anak muda begitu (Imam, 2017).”

Bentuk door to door juga dilakukan oleh para relawan perempuan AKDPP yang dijuluki srikandi AKDPP dengan masuk ke rumah dan warung- warung dan menjelaskan tujuan mereka kepada masyarakat. Seperti diceritakan pak itqon:

“kita tetap melakukan kegiatan door to door menggunakan srikandi srikandinya AKDPP untuk ke rumah-rumah. Relawan perempuan masuk ke warung-warung (Hakim, 2017).”

Sosialisasi dan kampanye yang dilakukan AKDPP salah satunya adalah dengan door to door atau melakukan kunjungan dari rumah ke rumah atau AKDPP melakukannya dari desa ke desa. Untuk strategi yang dilakukan AKDPP, para relawan mengadakan acara hiburan musik, kumpul dan diskusi bersama masyarakat sebagai objeknya. Selain itu AKDPP juga mengerahkan relawan perempuan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye dengan cara masuk ke rumah dan warung-warung milik masyarakat.

Dilakukannya door to door, agar masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal kotak kosong menjadi paham dengan kotak kosong. Dan masyarakat yang masih netral menjadi simpatik dengan gerakan yang dilakukan AKDPP.

Gerakan seperti ini menjadi lebih efektif karena para relawan dapat melakukan komunikasi secara langsung dan membuka proses dialog dengan calon konstituen sehingga dapat memberikan penjelasan secara detail dalam mempengaruhi dan membentuk konstituen baru.

1.2 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

AKDPP membentuk pengawas di TPS yang merupakan relawan AKDPP untuk mengontrol pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada pada 2017. Dibentuknya pengawas dari AKDPP bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam proses Pilkada. Seperti dijelaskan :

“Mempraktikkan sistem kontrol terhadap di tps masing-masing agar tidak terjadi kecurangan jadi kita bentuk pengawas-pengawas di TPS (Hakim, 2017).”

Undang-undang No.10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2015 belum mengatur kampanye kotak kosong dan keberadaan saksi di TPS dan sesuai PKPU No.14/2016 Pasal 1 Angka 23 menjelaskan, definisi saksi adalah orang yang mendapat mandat

tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Karena di hari pemungutan suara para relawan tidak bisa menjadi saksi dari kotak kosong, maka para relawan melakukan pemantauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara dengan memotret hasil di lapangan dan menyampaikan hasil pantauan kepada koordinator masing-masing wilayah dan dijadikan sebagai bukti jika ada kecurangan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya memelihara aksi kolektif yang diperjuangkan oleh relawan AKDPP. Seperti yang diceritakan pak sutiyo :

“Hanya kami memantau dan kami memotret, memetakan dari beberapa relawan kami hanya memposting dalam kejadian di tps masing-masing yang kami kawal. kalau kita tidak percaya pada penyelenggara tentunya kami sudah ada salurannya, mahkamah konstitusi untuk menguji (Sutiyo, 2017).”

Walaupun upaya yang ingin dilakukan oleh AKDPP untuk menjadi saksi sebagai aktifitas mengawal kotak kosong dibenturkan dengan aturan, namun gerakan ini mampu membaca peluang untuk tetap melakukan perlawanan dengan cara yang lain dan tidak melawan aturan yang ada. Keterbatasan ruang dalam melakukan gerakan membuat gerakan menjadi solutif menciptakan model gerakan untuk menjaga ritme perlawanan.

1.3 Gugatan Hasil Pilkada

AKDPP menemukan berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, namun para relawan tidak melakukan tindakan perlawanan secara langsung. AKDPP memilih jalur hukum sesuai aturan dalam pemilihan umum yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggapnya banyak kecurangan yang ditemukan di lapangan sebelum dan ketika hari pemungutan suara. Seperti yang dijelaskan pak sutiyo :

“seperti di tps yang mestinya hari tenang tidak ada satupun gambar paslon atau gambar kotak tetapi ironisnya ketika hari pemilihan justru gambar paslon ada dan partai pendukung ada. Lha ini kan sangat aneh, ini masif seluruh tps di Kabupaten Pati. Yang kedua, orang misalnya mau mencoblos dikawal masuk tps teman teman itu didorong untuk melakukan atau diarahkan untuk mencoblos paslon, yang ketiga dalam politik uang, pada hari-Hnya sendiri aja, malam harinya aja itu sudah banyak terjadi, itupun tertangkap tangan, itu juga banyak. Tidak cukup kuat untuk pengawasan untuk memberanikan diri melakukan tindakan. Karena tadi saya sudah evaluasi, kemudian saya renungkan, saya buat tim kemudian kami sepakat, kami menggugat (Sutiyo, 2017).”

Dalam mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, AKDPP bergerak bersama masyarakat yang lebih luas dengan membentuk tim advokasi yang dinamai Gerakan Masyarakat Pati (Geram Pati). Hal ini sebagai upaya menggalang kekuatan lebih besar dengan masyarakat yang lebih luas. Upaya untuk mendapatkan *legal standing* juga dilakukan, serta sebagai langkah konkrit dalam merangkul sumberdaya yang profesional. Seperti yang dijelaskan oleh pak sutiyo:

“kami sudah memakai istilah GERAM yang kami daftarkan sebagai gerakan masyarakat Pati. Sekarang AKDPP bukan menghilang tetapi bagian dari GERAM itu sendiri di dalamnya adalah AKDPP yang konsen memperjuangkan, hanya meluas, sudah kami daftarkan dan kemudian kami mengajukan gugatan di MK karena Pilkada sudah selesai, nah apapun hasilnya nanti patut kita hormati (Sutiyo, 2017).”

Dengan sikap mengajukan gugatan hukum, sebagai bentuk *civil society* yang teraktualisasi dalam aksi menjadi sebuah gerakan sosial, memperlihatkan bahwa AKDPP sadar dengan aturan hukum yang berlaku. Aksi yang dilakukan relawan ini merupakan bagian kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Maksudnya, AKDPP mengaktualisasikan gerakan melalui pelayanan hukum dalam bentuk advokasi, pengorganisasian yang lebih mapan dilakukan mewakili konstituen pendukung kotak kosong sebagai suara yang sah di dalam sistem demokrasi pemilihan dalam konteks pilkada serentak 2017 yang menghadirkan kotak kosong sebagai alternatif pilihan.

2. Tujuan Bersama (*common purpose*)

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas,

tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

Pak Sutiyo sebagai ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati menyatakan bahwa tidak ada paksaan terhadap relawan yang bergabung di AKDPP. AKDPP sangat terbuka bagi siapapun masyarakat yang ingin bergabung. Para relawan dalam Aliansi Kawal Pilkada demokrasi Pati bergabung atas dasar kesadaran diri, tidak ada paksaan.

“Sama sekali tanpa paksaan dan tidak pernah ya, karena itu suatu gerakan yang tanpa ada satu ikatan pemaksaan bahkan itu atas dasar kesadaran diri makanya tadi diawal saya katakan rekrutmen pun mereka yang melatarbelakangi sdmnya yang cukup, dalam hal ini setidaknya tidaknya karena masuk pada AKDPP ini sendiri pergerakan murni memperjuangkan demokrasi dan hak asasi oleh karena itu tanpa suatu kesadaran yang tinggi mereka tidak akan masuk ya (Sutiyo, 2017).”

Pak Kardono sebagai salah satu relawan dari Kec.Tambakromo menyatakan bergabung dengan AKDPP tanpa ada paksaan. Keinginannya untuk bergabung dengan AKDPP dilandasi oleh beberapa alasan. Kinerja calon petahana dalam masa jabatannya dirasa beberapa masyarakat tidak pro-rakyat sehingga menimbulkan kekecewaan, yang menyebabkan masyarakat tersebut dalam Pilkada pati 2017 mereka tidak mempunyai alternatif lain selain mendukung kotak kosong dan bergabung dengan AKDPP.

“Ya otomatis untuk tegaknya demokrasi pati. Ada hal-hal pertimbangan lainnya. kalau saya sendiri kan orang pati selatan yang memang tinggalnya di daerah pegunungan kendeng yang ada sangkut pautnya dengan penolakan pabrik semen. itu kalau

saya pribadi lho mas,itu intinya kan ada berbagai macam alasan mas, masuknya ke kotak koson gitu. (Kardono, 2017)”

Para relawan yang tergabung dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati terdiri dari berbagai elemen masyarakat, tidak memandang profesi, usia, agama dll. Semua masyarakat yang bisa bergabung dengan AKDPP. Relawan yang tergabung dalam AKDPP merupakan masyarakat dengan kesadaran untuk memperjuangkan demokrasi dan menginginkan perubahan untuk Kabupaten Pati yang lebih baik . Seperti yang diceritakan oleh Pak Sutiyo:

“dari tokoh petani juga banyak, kemudian tokoh-tokoh swasta juga banyak, orang yang sudah purna dari ASN juga banyak, kemudian adek-adek yang masih belajar pemula sebagai pemilih pemula kemarin ya adik-adik SMA, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. hal ini setidak tidaknya karena masuk pada AKDPP ini sendiri pergerakan murni memperjuangkan demokrasi dan hak asasi oleh karena itu tanpa suatu kesadaran yang tinggi mereka tidak akan masuk ya (Sutiyo, 2017).”

Menolak untuk memilih pasangan calon Haryanto-Syaiful Arifin, Pak Kardono mempunyai alasan dan keinginan sehingga memilih bersama gerakan yang mendukung kotak kosong. Calon petahana yang dinilainya tidak pro rakyat dengan kebijakannya mendukung pendirian pabrik semen di wilayah pati. Anggapan mengenai proses pencalonan yang melalui proses tidak fair yang dilakukan calon petahana, menggerakkan pak kardono untuk menciptakan demokrasi yang baik sebagai tujuannya, dan menentang kemenangan pasangan calon Haryanto-Syaiful Arifin. Seperti yang diceritakan dibawah ini:

“Saya bergabung AKDPP untuk tegaknya demokrasi pati. Ada hal-hal pertimbangan lainnya. kalau saya sendiri kan orang pati selatan yang memang tinggalnya di daerah pegunungan kendeng yang ada sangkut pautnya dengan penolakan pabrik semen. lalu petahana dengan cara membeli partai dengan niat yang awalnya memang dia ingin menjadi calon tunggal sampai menghalalkan segala cara, seperti itu kan dari awal sudah arogan. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain, untuk demokrasi kan tidak fair. (Kardono, 2017).”

Alasan lain dari relawan yang bergerak mendukung kotak kosong adalah menolak posisi bupati pati yang maju sebagai calon petahana karena kebijakan-kebijakan dari calon petahana tersebut dinilai tidak pro rakyat. Hal tersebut mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin baru di Kabupaten Pati. Seperti dijelaskan pak sutiyo:

“kita menolak karena kebijakan-kebijakan bupati petahana terbukti mereka sudah tidak pro terhadap rakyatnya, oleh karena itu kami menargetkan untuk kedepannya agar ada pemilihan ulang untuk memiliki pemimpin yang baru (Sutiyo, 2017).”

Banyaknya kader-kader partai politik dan masyarakat yang mempunyai potensi untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 namun tidak terakomodir oleh partai politik menjadikan sebuah masalah baru yang dianggap sebagai kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut juga menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat pati bahwa adanya proses kandidasi yang tidak fair yang sudah dirancang untuk menghadirkan satu pasangan calon yang dilakukan oleh calon petahana dan partai politik. Sebaliknya dikalangan masyarakat

banyak yang menginginkan adanya perubahan. Hal seperti itu yang membuat prihatin Pak Sutiyo sebagai ketua AKDPP. Kemunduran demokrasi, bahkan disebutnya demokrasi yang ada di Pati adalah demokrasi mati suri. Maka Pak Sutiyo ingin memperjuangkan dan menegakkan demokrasi di Kabupaten Pati untuk mewakili aspirasi masyarakat yang menolak pasangan calon petahana dengan mendukung kotak kosong. Seperti yang diceritakan di bawah ini:

“...padahal kader-kader berpotensi luar bisa banyak, tetapi sekali lagi tidak ada satupun dari kader partai yang diakomodir oleh partai. saya katakan kami sangat prihatin sekali untuk memperlihatkan bahkan memperlihatkan dimana warga masyarakat sebetulnya ada konsep menginginkan sekali adanya perubahan. saya bagian memperjuangkan demokrasi yang ada, oleh karena itu kami terdorong untuk mengimbangi karena semua dari calon yang mendaftar gagal total akhirnya satu petahana (Sutiyo, 2017).”

Selain itu, isu mengenai sosialisasi yang salah di beberapa wilayah di Kabupaten Pati yang dilakukan aparatur desa dengan memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat mengenai kotak kosong membuat mas imam bergerak sebagai salah satu relawan untuk membantu memberikan pendidikan politik atau menyampaikan pemahaman mengenai kotak kosong kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan secara benar. Seperti yang dijelaskan mas imam di bawah ini :

“temen-temen relawan cuma untuk membantu masyarakat, untuk membenarkan sosialisasi yang ada. Saya dulunya itu cuek, tapi berhubung saya mendengar opini atau selempitan sedikit kalau di wilayah kidul atau di beberapa wilayah di Kabupaten Pati banyak sosialisasi yang salah yang dilakukan

aparatur desa, ya salah satunya tadi masyarakat kalau tidak suka calon tunggal disuruh golput atau tidak usah berangkat mencoblos. Kan itu sesuatu yang salah (Imam, 2017).”

Tujuan yang sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat juga dimiliki oleh pak Itqonul Hakim sebagai salah satu aktor penggagas AKDPP. Dijelaskan dibawah ini:

“...untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa demokrasi memperbolehkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya apabila tidak cocok dengan calon tunggal tersebut (Hakim, 2017).”

Alasan para relawan untuk bergabung untuk mendukung kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017 tidak terlepas dari latarbelakang mereka. Penolakan penambangan di pegunungan kendeng yang berkaitan dengan kebijakan calon petahana. Seperti yang dikemukakan mas imam yang merupakan dari salah satu pemuda yang bergerak dengan isu kendeng merasa bahwa harus melawan calon petahana dengan melalui pilihan politik yakni mendukung kotak kosong. Seperti yang dijelaskan dibawah ini:

“kita sebagai temen-temen muda mungkin yang bergerak dengan isu kendeng jadi kita harus melawan calon petahana ini salah satunya dengan melalui pilihan politik ini yaitu kotak kosong. Jadi bagaimana caranya kita menyuarakan kotak kosong, menggalang temen-temen yang satu suara sama kita, kita mengenalkan kepada masyarakat bagaimana sosok petahana ini. (Imam, 2017)”.

Mendukung dan memenangkan kotak kosong bukan menjadi tujuan utama yang dilakukan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati, namun memenangkan kotak kosong merupakan strategi yang

dilakukan untuk menghadirkan pasangan calon lain selain pasangan calon petahana yang dianggap tidak pro rakyat. Dengan harapan menangnya kotak kosong dalam Pilkada pati 2017, setelah itu membuka peluang kepada masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili aspirasi masyarakat. Sebagai langkahnya adalah memenangkan kota kosong untuk menentang kemenangan pasangan calon Haryanto-Syaiful Arifin, dan sebagai tujuan utamanya adalah memperjuangkan demokrasi dalam Pilkada pati dan perubahan kepala daerah di Kabupaten Pati. Seperti artikel yang dimuat dalam relawankotakpati.org :

“Misi pendukung kotak kosong bukanlah asal kotak kosong yang menang, tetapi kotak kosong hanya sebagai sarana untuk membuat pati lebih baik. itu baru langkah awal. Jika kotak kosong menang, kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk putra terbaik di pati untuk menawarkan visi, misi, dan programnya kepada kami. Dan belum tentu kami memilih calon yang sama. Demokrasi harus kembali utuh di tangan rakyat, dan program tidak pro rakyat harus dihentikan. Menangkan kotak kosong dan buka gembok demokrasi yang membelenggu rakyat. Kampanye memenangkan kotak kosong yang dilakukan untuk menentang pasangan calon Haryanto-syaiful arifin , akan tetapi adalah sebuah bentuk perlawanan rakyat terhadap politik kanibalistik yang dipertontonkan elit selama ini. (relawankotakpati.org, 2017).”

Dalam sebuah kolektivitas aksi, tujuan dan nilai-nilai bersama menjadi basis dalam sebuah tindakan-tindakan bersama. Berbagai persepsi dari individu-individu yang tergabung dalam AKDPP yang memandang adanya permasalahan di Kabupaten Pati memunculkan suatu tujuan bersama dalam menghadapi Pilkada serentak khususnya di Kabupaten Pati.

Dari paparan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan bersama dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati adalah memenangkan kotak kosong sebagai strategi untuk menghadirkan pasangan calon lain selain pasangan calon petahana yang dianggap tidak pro rakyat. Target dari masyarakat yaitu memiliki pemimpin baru dan menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan maju untuk daerahnya.

3. Solidaritas dan Identitas

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (*common denominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

Keinginan relawan kotak kosong yang tergabung dalam Aliansi Kawal Pilkada Kabupaten Pati untuk mengkawal pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati merupakan salah satu ekspresi dari gagasan dan ide masyarakat sebagai bentuk kebebasan dalam melakukan aktivitas politiknya, yakni berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih kepala daerah.

Aliansi Kawal Demokrasi Pati sebagai sebagai bentuk ekspresi masyarakat, gerakannya bebas dari ketergantungan dan tanpa adanya intervensi negara dan pasar, sangat inklusif dan mandiri. Maksudnya yakni terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung sebagai relawan namun mempunyai ketetapan harus mengikuti arah perjuangan yang telah ditentukan. Serta tidak menutup diri dari partai politik atau aktor politik lain yang ingin bergabung. Masyarakat yang menjadi relawan berangkat dari kesadaran diri melakukan perubahan untuk pati yang lebih baik.

Kebebasan AKDPP dari ketergantungan dan intervensi dari negara dan pasar dapat ditunjukkan oleh pernyataan sikap dari AKDPP dalam membantah isu yang beredar mengenai ditunggangnya AKDPP oleh beberapa aktor di Pati seperti Budiyono yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Pati dan oleh partai Nasdem yang notabene adalah satu-satunya partai yang tidak mendukung pasangan calon tunggal.

Wakil Bupati Pati yang sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati yang dikatakan sebagai aktor di balik kotak kosong. Kemudian dibuat merembet dengan menggulirkan isu penyelamatan alam (pegunungan kendeng) sebagai kendaraan untuk Budiyono. Apakah relawan kolom kosong menolak jika Budiyono jika mau bergabung dengan pendukung relawan kotak kosong?

“Tidak, sama sekali tidak. Bahkan jika pasangan calon atau tim suksesnya mencoblos kolom kosong atau bergabung

dengan tindakan pada hari pemungutan suara pun, jelas kami tidak menolak. Silahkan, ini rumah besar warga pati yang ingin perubahan (relawankotakpati.org, 2017).”

Kemudian isu kedua adalah kolom kosong ditunggangi Nasdem.

Benarkah?

“Sekali lagi kami jawab jika Nasdem ikut bergabung ya monggo, tidak pun tidak masalah. Disini relawan, bukan bayaran. Anda tidak dibayar disini, bahkan anda harus mengeluarkan dana anda sendiri dengan kesadaran sendiri dan langkah yang anda pilih sendiri. Karena kami peduli dengan Pati. Siapa pun boleh menumpang tapi ikut kami arahnya (relawankotakpati.org, 2017).”

Sikap yang diambil oleh para relawan dalam AKDPP untuk menegaskan bahwa orang yang ingin bergabung dengan gerakan ini, semua kalangan masyarakat diperbolehkan untuk bergabung dengan aliansi tetapi harus mengikuti arah dan tujuan yang diperjuangkan oleh AKDPP tak terkecuali partai politik dan aktor-aktor politik yang ingin bergabung. Gerakan ini juga lahir dari keprihatinan masyarakat yang didasarkan atas persatuan dan kesatuan serta kesadaran masyarakat yang menghendaki adanya perubahan untuk Kabupaten Pati yang lebih baik. Bahkan dalam mendanai gerakannya para relawan harus menggalang dana dari masyarakat dan dengan dana pribadi.

Perasaan kesamaan tujuan yang dimiliki oleh relawan yang tergabung mendukung kotak kosong menjadikan sebagai identitas dan solidaritas dalam melakukan gerakannya. Mereka memahami bahwa diantara para relawan yang mendukung kotak kosong

mempunyai perbedaan kepentingan namun mempunyai tujuan yang sama. Dengan prinsip “Musuh lawan mu itu temanmu” menjadikan mas imam sebagai aktivis yang menolak pabrik semen untuk bergerak bersama dengan kelompok lain dalam mendukung kotak kosong. Seperti yang dijelaskannya :

“Kita kan cuma satu tujuan, kalau saya menyebut dalam sistem politik itu ya musuh lawan mu itu temanmu. Temen-temen relawan kotak kosong yang salah satunya bergerak dan sering mengikuti isu kendeng, itukan faktornya karena tidak suka dengan calon petahana dan karena kebijakan-kebijakannya mengenai pabrik semen, tapi di lain sisi temen-temen yang menyuarakan kotak kosong mungkin kepentingan lain, kita mempunyai kepentingan yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama (Imam, 2017).”

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh AKDPP dalam melakukan gerakannya, seperti dibenturkan dengan peraturan, intimidasi, bahkan pengrusakan, tidak membuat gentar bagi para relawan yang diawal sudah berkomitmen bergerak bersama untuk melakukan dukungan terhadap kotak kosong di Pilkada Pati 2017 yang tak lain adalah menginginkan adanya penguatan demokrasi di Kabupaten Pati. Hambatan yang dihadapi oleh AKDPP justru mampu membentuk solidaritas dikalangan relawan karena ketika menghadapi tentangan dari pihak lawan, AKDPP selalu bergerak bersama untuk melakukan tindakan perlawanan tanpa kekerasan seperti memasang kembali alat peraga yang diturunkan atau dirusak, membuat kegiatan kolektif yang inovatif ketika dibenturkan dengan aturan yang melarang mengadakan kegiatan sebagai aksi gerakan AKDPP.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi sekte religious, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Kegiatan yang dilakukan AKDPP seringkali menuai hambatan yang terkadang dibenturkan dengan peraturan, intimidasi bahkan pengrusakan. AKDPP menganggap bahwa pihak penyelenggara pemilu di Kabupaten Pati tidak kooperatif dalam menanggapi adanya gerakan dari masyarakat ini. Tetapi AKDPP tidak begitu saja berhenti dengan adanya hambatan-hambatan tersebut. Para relawan berkomitmen tetap menjalankan perjuangannya.

“Saya mensosialisasikan berbagai macam perjuangan kami sosialisasi kami dihadang, sosialisasi kami dilarang, sosialisasi disana sini kami diintimidasi bahkan mobil saya itu dirusak. Nah ajakan-ajakan ini tidak malah tidak ditanggapi dengan baik oleh penyelenggara bahkan menjadi musuh kami ini. Oleh karena itu

kami perjuangkan ini tidak berhenti. Ketika itu sekalipun kami dilarang tapi tetep kami jalan terus (Sutiyo, 2017).”

Dengan kepercayaan diri untuk menunjukkan kepedulian terhadap demokrasi di Kabupaten Pati, AKDPP terbentuk dan menjalankan gerakannya atas kesadaran diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, meskipun seringkali mendapatkan pelarangan dari berbagai pihak. Namun AKDPP percaya bahwa di dalam kehidupan demokrasi sekarang ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, berekspresi, mempunyai gagasan, dan menyampaikan pandangan politiknya sehingga kegiatan yang dilakukannya merupakan hak sebagai warga negara dalam mengawal proses demokrasi dalam Pilkada khususnya di Kabupaten Pati. Rasa mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga demokrasi di Kabupaten Pati, membuat AKDPP tetap percaya diri dalam melaksanakan kegiatannya walaupun seringkali mendapatkan hambatan-hambatan dalam mengkampanyekan kotak kosong.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sutiyo sebagai Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati:

“...melakukan beberapa kegiatan termasuk deklarasi, ketika itu sekalipun kami dilarang tapi tetep kami jalan terus. Kenapa saya percaya dan memberanikan diri karena di dalam undang-undang pun hak setiap warga negara yang ingin berpartisipasi untuk mengekspresikan gagasan, pandangan, nah inilah di alam kemerdekaan seperti sekarang untuk daerah Pati saya anggap mundur satu langkah flashbacknya ke belakang seperti orde baru (Sutiyo, 2017).”

Dengan berbagai hambatan, relawan menjadi lebih kritis dan inovatif dalam gerakannya. Para relawan mengubah bentuk kegiatan yang sudah direncanakan dengan kegiatan lain agar aksi kolektif dari gerakan yang dilakukan tetap berjalan. Seperti ketika kegiatan longmarch yang seharusnya menjadi bentuk aksi tetapi tidak diperbolehkan oleh pihak kepolisian sehingga pihak AKDPP berinisiatif untuk melakukan kegiatan lain seperti menyambangi dan memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah pati yang menimpa beberapa daerah seperti kecamatan Jakenan, pucawangi, dan juwana.

Selain itu para relawan perempuan yang disebutnya srikandi AKDPP melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten ati 2017. Seperti yang dijelaskan pak itqon:

“Kita tetep misalkan hari ini akan mengadakan longmarch tapi tidak diperbolehkan, ya kita mengadakan kegiatan lain seperti menyambangi korban banjir. Di pati kan ada banjir to, relawan bareng2 datang dan menyantuni korban banjir. Kegiatan seperti itukan tidak perlu ijin. tapi kalo longmarch dan deklarasi waktu itu dilarang yaudah gapapa, kita tetap melakukan kegiatan door to door menggunakan srikandi srikandinya AKDPP untuk ke rumah-rumah (Hakim, 2017).”

Dengan adanya hal tersebut para relawan merancang strategi agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan. Seperti dengan mengelabui aparat desa dan keamanan di wilayah pelaksanaan kegiatan, karena para relawan merasa sering mendapatkan tentangan

melalui aturan- aturan bahkan terkadang dengan pembubaran kegiatan. Menghadapi hal tersebut mereka mengadakan acara lebih cepat dari ijin yang diajukan kepada pihak desa dan keamanan untuk mengantisipasi aksi dari pihak lawan. Seperti yang diceritakan mas imam:

“Kita tetap berjalan, berusaha mengikuti kemauan mereka. Seperti ketika di dukuh seti ya, kita bisa dikatakan mengelabui pemerintah desa, kita pemberitahuan di desa untuk kegiatan hari minggu, pemberitahuan di polsek juga hari minggu, cuma kegiatan kita di dukuh seti itu cuma kegiatan kecil2an, cuma memakai pengeras suara kecil. jadi kan kegiatan seperti itu tidak perlu ijin kan, cukup melakukan pemberitahuan. Tapi kita laksanakan acara di hari sabtu, jadi kemarin itu alat2 kita siagakan di mobil terbuka, jam 1 kita kesana dan acara langsung kita mulai. Kita memaksimalkan waktu kita untuk tujuan kita, sosialisasi untuk temen2 di daerah situ (Imam, 2017).”

Selain melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, para relawan juga membuat alat peraga kampanye seperti baliho yang dipasang di beberapa tempat. Tetapi baliho yang dipasang selalu diturunkan oleh aparat satpol pp dengan beberapa alasan. Seperti baliho yang dipasang di Kecamatan Juwana dan Dukuhseti. Kepala satpol pp Pati Hadi Santosa (2016) mengatakan, penurunan baliho dan alat sosialisasi lain itu murni karena penegakkan aturan. Penertiban atribut kotak kosong lantaran pemasangannya tanpa izin.

Namun para relawan mempunyai aksi balasan ketika alat peraganya diturunkan. Para relawan mempunyai inisiatif untuk memasang kembali baliho yang diturunkan oleh satpol pp tersebut.

Aksi- aksi kecil seperti ini dilakukan untuk mempertahankan upaya memperkenalkan kotak kosong kepada masyarakat melalui alat peraga. Seperti yang diceritakan mas imam :

“Membuat baliho juga pernah kita lakukan, Cuma kalau baliho kita pasang pasti tidak sampai dua hari sudah dicopot, yang nyopot itu satpol pp dengan alasan kita tidak mempunyai ijin reklame, kita dibenturkan dengan ijin reklame. Padahal itu bukan iklan, padahal dari KPU sendiri itu kan seharusnya yang mensosialisasikan malah tidak mensosialisasikan. Sempet di juwana, dukuhseti temen-temen relawan membuat baliho tapi diturunkan oleh satpol pp. Tapi kadang ada temen2 yang memasang lagi baliho yang dicopot (Imam, 2017).”

Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1/2015 belum mengatur kampanye kotak kosong dan keberadaan saksi disetiap tempat pemungutan suara(TPS) pada pemilihan kepala daerah serentak. Sesuai dengan peraturan KPU(PKPU) Nomor14/2016 Pasal 1 Angka 23 menjelaskan, definisi saksi adalah orang yang mendapatkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Sementara itu, eksistensi kotak kosong tidak menjadi representasi dari pasangan calon. Kotak kosong juga tidak diakui sebagai peserta Pilkada. Dengan mengacu pada regulasi tersebut, para relawan yang tergabung dalam AKDPP tidak dapat menjadi saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Para relawan yang tergabung dalam AKDPP mengikuti aturan tersebut, sehingga tidak masuk sebagai saksi dalam pemungutan dan

penghitungan suara seperti yang dijelaskan oleh Pak Sutiyo sebagai Ketua AKDPP:

“kami tidak diakomodir dan dalam undang-undang memang bukan calon oleh karena itu mereka mempunyai satu argumen AKDPP tidak bisa untuk diakomodir sebagai saksi makanya saksi pun dari mereka sendiri (Sutiyo, 2017).”

Karena di hari pemungutan suara para relawan tidak bisa menjadi saksi dari kotak kosong, maka para relawan melakukan pemantauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara dengan memotret hasil di lapangan dan menyampaikan hasil pantauan kepada koordinator masing-masing wilayah dan dijadikan sebagai bukti jika ada kecurangan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya memelihara aksi kolektif yang diperjuangkan oleh relawan AKDPP. Seperti yang diceritakan pak sutiyo :

“Hanya kami memantau dan kami memotret, memetakan dari beberapa relawan kami hanya memposting dalam kejadian di tps masing-masing yang kami kawal. kalau kita tidak percaya pada penyelenggara tentunya kami sudah ada salurannya, mahkamah konstitusi untuk menguji (Sutiyo, 2017).”

Banyak juga para relawan AKDPP yang menerima uang sebagai bentuk money politik dari pendukung pasangan calon Haryanto-Syaiful Arifin namun para relawan berinisiatif untuk memberikan uang tersebut kepada pihak panitia pengawas pemilu sebagai bentuk laporan bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan lawan. Yang dilakukan AKDPP tersebut merupakan sebuah bentuk tindakan mengganggu dan menghalangi aktivitas dari pihaklawan.

Namun yang dilakukan AKDPP tersebut tidak ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Seperti yang dijelaskan mas imam:

“Banyaknya money politik sebelum hari H, temen2 kita yang mendapatkan itu banyak dan kita serahkan ke panwaslu pati. Menanggapi tapi kurang serius, mereka kesannya menutup menutupi (Imam, 2017).”

AKDPP menemukan berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, namun para relawan tidak melakukan tindakan perlawanan secara langsung. AKDPP memilih jalur hukum sesuai aturan dalam pemilihan umum yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggapnya banyak kecurangan yang ditemukan di lapangan sebelum dan ketika hari pemungutan suara. Seperti yang dijelaskan pak sutiyo :

“seperti di tps yang mestinya hari tenang tidak ada satupun gambar paslon atau gambar kotak tetapi ironisnya ketika hari pemilihan justru gambar paslon ada dan partai pendukung ada. Lha ini kan sangat aneh, ini masif seluruh tps di Kabupaten Pati. Yang kedua, orang misalnya mau mencoblos dikawal masuk tps teman teman itu didorong untuk melakukan atau diarahkan untuk mencoblos paslon, yang ketiga dalam politik uang, pada hari-Hnya sendiri aja, malam harinya aja itu sudah banyak terjadi, itupun tertangkap tangan, itu juga banyak. Tidak cukup kuat untuk pengawasan untuk memberanikan diri melakukan tindakan. Karena tadi saya sudah evaluasi, kemudian saya renungkan, saya buat tim kemudian kami sepakat, kami menggugat (Sutiyo, 2017).”

Ketika dukungan masyarakat semakin besar, AKDPP bersama masyarakat lain melebur menjadi tim advokasi yang disebut Gerakan Masyarakat Pati atau Geram Pati. Untuk mengkawal hasil Pilkada dengan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi gerakan ini

menunjuk beberapa kuasa hukum yang terdiri dari Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, dan Sri Suparyati. AKDPP bukan menghilang tetapi melebur bersama masyarakat yang lebih luas untuk menggugat perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati. Hal itu dijelaskan pak Sutiyo:

“warga masyarakat cenderung bergerak kami lebih besar akhirnya kami merubah nama menjadi gerakan masyarakat pati (GERAMPati) dan sudah kami daftarkan di notaris. banyak simpatisan warga masyarakat yang ingin bergabung oleh karena itu untuk mewadahi pergerakan ini yang lebih besar dengan memakai istilah GERAM yang kami daftarkan sebagai gerakan masyarakat Pati. Sekarang AKDPP bukan menghilang tetapi bagian dari GERAM itu sendiri di dalamnya adalah AKDPP yang konsen memperjuangkan, hanya meluas, melebar sehingga menjadi gerakan masyarakat pati (Sutiyo, 2017).”

Dari relawan ada yang mempunyai inisiatif membuat website untuk mensosialisasikan kotak kosong kepada masyarakat melalui internet. Sebelum pelaksanaan Pilkada website yang dibuat tersebut sempat aktif dengan tulisan dan artikel yang bisa dibaca oleh semua masyarakat. Namun beberapa bulan setelah Pilkada selesai, aktivitas dalam website divakumkan. Para relawan berencana menggunakan website tersebut untuk kedepannya sebagai media kontrol terhadap pemerintahan Kabupaten Pati. Seperti yang dijelaskan oleh mas imam:

“Kita membuat itu (website), tapi untuk saat ini kita vakum dulu. grup relawan juga vakumkan dulu, mungkin nanti grup relawan ini akan panjang, jangka panjangnya akan saya buat untuk memantau pemerintahan. Istilahnya kita sebagai oposisi dalam pemerintahan (Imam, 2017).”

Melalui penjabaran diatas dengan menggunakan empat properti dasar dalam melihat Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati sebagai gerakan sosial, penulis memandang bahwa AKDPP merupakan suatu bentuk aktivisme civil society yang khas. Gerakan aktivisme civil society terwujud menjadi gerakan sosial yang dilakukan AKDPP mempunyai aktivitas yang khas yakni kerelawanan dari masyarakat dalam mendukung kolom kosong yang notabene adalah pilihan alternatif yang tidak menawarkan sosok dalam kontestasi pemilihan namun sebagai alternatif pilihan yang menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap calon tunggal.

Gerakan AKDPP tidak direpresentasikan oleh suatu organisasi tertentu dan sangat inklusif. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan AKDPP seperti dari masyarakat penolak pertambangan di gunung kendeng, pensiunan aparatur sipil negara, petani, komunitas-komunitas bahkan sampai kader partai politik, dll. Mereka memahami bahwa diantara para relawan yang mendukung kotak kosong mempunyai perbedaan kepentingan namun mempunyai tujuan yang sama. Keterlibatan masyarakat dalam gerakan AKDPP membentuk suatu solidaritas dan identitas yang didasari dengan prinsip “musuh lawanmu, itu temanmu”. Semua pihak dalam masyarakat yang setuju dengan cita-cita gerakan yang dilakukan AKDPP dapat terlibat dalam gerakan, maka gerakan AKDPP sesungguhnya merupakan pertukaran berbagai pihak yang bersedia bekerja untuk perubahan.

Menurut Horton (1999), gerakan sosial lahir pada mulanya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas terhadap suatu kondisi keadaan. Kelompok itu semula tidak terorganisasi, dan tidak terarah, serta tidak memiliki perencanaan yang matang. Senada dengan pendapat Horton, penulis melihat bahwa Gerakan yang dilakukan AKDPP dilatarbelakangi oleh kegelisahan masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi yang ada. Yang pertama adalah kondisi dimana proses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pati yang hanya memunculkan satu pasang calon yakni calon petahana. Ketidakpuasan masyarakat terhadap calon tunggal dalam pemilu di Kabupaten Pati yang notabene adalah petahana ternyata dikarenakan kinerja petahana yang dinilai buruk dan tidak pro terhadap lingkungan dan masyarakat kecil. Selain itu juga kepercayaan masyarakat terhadap fungsi partai politik yang dinilai tidak mampu melahirkan kader untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum yang menurut masyarakat disebabkan adanya politik transaksional yang dilakukan partai dalam proses pencalonan dalam pemilihan umum serentak 2017 di Kabupaten Pati. Munculnya rasa ketidakpuasan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pati sebagai pihak penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pati juga memicu masyarakat untuk membentuk suatu gerakan.

Upaya-upaya yang dilakukan AKDPP hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan partai politik dalam melakukan mobilisasi masa. Seperti kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan dengan

cara-cara turun langsung kemasyarakat dengan bakti sosial atau memberikan bantuan kemasyarakat dan menggunakan alat peraga, selain itu juga dilakukan sosialisasi dan kampanye melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun gerakan AKDPP muncul dengan kesukarelaan masyarakat dengan segala keterbatasan sumberdaya sebagai khas dari gerakan sosial yang merupakan bagian dari bentuk protes dan kritik terhadap pemerintah yang juga hadir sebagai lawan politiknya. Hal ini yang membedakan gerakan yang dilakukan oleh AKDPP dengan partai politik.

B. Tipologi AKDPP Sebagai Gerakan Sosial

Menurut Sztompka ada beberapa klasifikasi gerakan sosial yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: *pertama*, menurut bidang perubahanyang diinginkan, *kedua*, menurut kualitas perubahan yang diinginkan. *Ketiga*, menurut target perubahannya. *Keempat*, menurut arah perubahan yang diinginkan. *Kelima*, menurut strategi yang mendasari atau “logika tindakan mereka”. *Keenam*, menurut sejarah perkembangannya.

1. Menurut bidang perubahan yang diinginkan. Tipe gerakan sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Gerakan reformasi, yang merupakan gerakan sosial dengan tujuan terbatas hanya untuk mengubah spek tertentu dalam masyarakat tanpa menyentuh inti struktur lembaganya. Misal: gerakan menolak UU antipornografi dan pornoaksi.

b. Gerakan radikal, merupakan gerakan yang mengupayakan perubahan yang lebih mendalam yang menyentuh landasan organisasi sosial. Misal: gerakan antiapartheid di Afrika Selatan.

Yang menjadi tujuan bersama dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati adalah memenangkan kotak kosong sebagai strategi untuk menghadirkan pasangan calon lain selain pasangan calon petahana yang dianggap tidak pro rakyat. Keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin baru dan menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan maju untuk daerahnya.

Gerakan yang dilakukan hanya ingin merubah kepemimpinan di Kabupaten Pati yang dirasa prestasi buruk dalam masa kepemimpinan calon petahana. Dengan demikian menunjukkan dengan terbatas hanya untuk mengubah spek tertentu dalam masyarakat tanpa menyentuh inti struktur lembaganya. Maka dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan AKDPP menurut bidang perubahan yang diinginkan adalah gerakan reformasi.

2. Menurut kualitas perubahan yang diinginkan. Kelompok gerakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Gerakan *konservatif*. Gerakan ini merupakan gerakan yang mengarah ke masa lalu. Gerakan ini berupaya memperbaiki lembaga, hukum, cara hidup serta keyakinan yang telah mapan dimasa lalu tetapi mengalami erosi dan dibuang dalam perjalanan sejarah.

- b. Gerakan *progresif*, yaitu gerakan yang menekankan pada inovasi, mengenalkan lembaga baru yang berorientasi masa depan.

Salah satu hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan yang dilakukan AKDPP adalah Keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin baru dan menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan maju untuk daerahnya. Ingin memperjuangkan dan menegakkan demokrasi di Kabupaten Pati untuk mewakili aspirasi masyarakat yang menolak pasangan calon petahana dengan mendukung kotak kosong. AKDPP bergerak untuk mengimbangi Pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon, yakni calonnya merupakan petahana. AKDPP juga sebagai alat kontrol terhadap pemerintah di Kabupaten Pati, ketika menghadapi dan setelah proses pemilihan kepala daerah.

Adanya kontrol terhadap pemerintah dari masyarakat yang bergerak bersama dapat disimpulkan bahwa gerakan ini menekankan pada inovasi, mengenalkan lembaga baru yang berorientasi masa depan yakni menginginkan adanya perubahan menjadi lebih baik untuk Kabupaten Pati. Maka gerakan yang dilakukan AKDPP menurut kualitas perubahan yang diinginkan merupakan gerakan sosial progresif.

3. Menurut target perubahannya. Tipe gerakan sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Gerakan sosial yang memusatkan target perubahannya pada perubahan struktur sosial. Misal: gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1966 dan 1998. Beberapa kelompok gerakan ini biasanya akan bergabung (berafiliasi) dengan partai politik. Tetapi ada juga yang tetap berada di luar sistem partai politik.
- b. Gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan diri individu. Misal: gerakan keagamaan yang menginginkan perubahan dalam diri individu, gerakan disiplin nasional.

Yang menjadi tujuan bersama dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati adalah memenangkan kotak kosong sebagai strategi untuk menghadirkan pasangan calon lain selain pasangan calon petahana yang dianggap tidak pro rakyat. Target dari masyarakat yaitu memiliki pemimpin baru dan menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan maju untuk daerahnya.

Dengan target memiliki pemimpin baru di Kabupaten Pati merupakan kehendak mengubah pemegang struktur pemerintahan yakni kepala eksekutif daerah di Kabupaten Pati atau bupati. Gerakan yang dilakukan AKDPP juga berafiliasi dengan partai politik yaitu partai Nasdem. Karena kesamaan tujuan dalam melakukan gerakannya. Maka menurut target perubahannya, AKDPP merupakan gerakan sosial yang memusatkan target perubahannya pada perubahan struktur sosial.

4. Menurut arah perubahan yang diinginkan. Tipe gerakan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Gerakan sosial positif, yaitu berupaya untuk mengenalkan perubahan tertentu serta membuat perbedaan. Gerakan ini juga dimaksudkan untuk memerangi suatu kebijakan yang dinilai memberi dampak negatif.
 - b. Gerakan sosial negatif. Gerakan sosial ini dimobilisasi untuk mengganti undang-undang tertentu. Misal: gerakan menolak UU antipornografi dan pornoaksi.

Mengenai sosialisasi yang salah di beberapa wilayah di Kabupaten Pati yang dilakukan aparat desa dengan memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat mengenai kotak kosong menggerakkan masyarakat sebagai relawan untuk membantu memberikan pendidikan politik atau menyampaikan pemahaman mengenai kotak kosong.

Calon petahana yang dinilai tidak pro rakyat dengan kebijakannya mendukung pendirian pabrik semen di wilayah pati dan masalah lain seperti maraknya toko modern berjejaring, taman kota yang terbengkalai, jual beli jabatan, dan lain-lain . Persepsi di kalangan masyarakat pati bahwa adanya proses kandidasi yang tidak fair yang sudah dirancang untuk menghadirkan satu pasangan calon yang dilakukan oleh calon petahana dan partai politik.

Gerakan yang dilakukan AKDPP merupakan sebuah penolakan terhadap calon petahana yang maju di Pilkada yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yang telah disebutkan diatas. AKDPP berupaya untuk mengenalkan perubahan tertentu serta membuat perbedaan. Gerakan ini juga dimaksudkan untuk memerangi suatu kebijakan yang dinilai memberi dampak negatif. Maka menurut arah perubahan yang diinginkan, AKDPP merupakan gerakan sosial positif.

5. Menurut strategi yang mendasari atau "logika tindakan mereka".

Ada dua tipe gerakan ini, yaitu:

- a. Gerakan yang mengikuti logika instrumental yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuatan politik itu mereka memaksakan perubahan yang diinginkan dalam peraturan hukum, lembaga dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah sebagai alat kontrol politik.
- b. Gerakan yang mengedepankan logika perasan. Gerakan ini bertujuan untuk menguatkan identitas agar mendapat pengakuan umum dan mendapat posisi yang setara dengan kelompok lain. Gerakan ini misalnya adalah gerakan perempuan (feminisme).

Tujuan bersama dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati adalah memenangkan kotak kosong sebagai strategi untuk menghadirkan pasangan calon lain selain pasangan calon petahana yang dianggap tidak pro rakyat. AKDPP juga sebagai alat kontrol

terhadap pemerintah di Kabupaten Pati, ketika menghadapi dan setelah proses pemilihan kepala daerah.

Gerakan yang dilakukan untuk kemenangan kotak kosong merupakan bentuk upaya melakukan perubahan dalam lembaga eksekutif yaitu kepala daerah atau bupati. Kegiatan AKDPP juga bentuk kontrol politik dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum bahkan jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati. Maka menurut strategi yang mendasari atau "logika tindakan mereka", AKDPP merupakan gerakan yang mengikuti logika instrumental.

6. Menurut sejarah perkembangannya. Tipologi gerakan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Gerakan sosial lama(GSL) yaitu gerakan sosial yang menonjol pada masa awal modernisasi. Gerakan sosial ini memusatkan perhatian pada kepentingan ekonomi, anggotanya kebanyakan direkrut dari kelas sosial tertentu, sifat organisasinya kaku serta desentralistis.
 - b. Gerakan sosial baru (GSB) yaitu gerakan sosial yang muncul pada masa akhir perkembangan modernisasi. Gerakan ini memiliki ciri yaitu memusatkan perhatian pada isu-isu baru, kepentingan baru, serta medan konflik kepentingan baru. Misal: gerakan feminis, gerakan hak-hak sipil, gerakan lingkungan dll.

Gerakan dari AKDPP muncul setelah ditetapkan peserta pemilihan kepala daerah yang menghasilkan hanya satu pasangan calon yang harus melawan kolom kosong. Gerakan AKDPP memusatkan perhatian pada proses pemilihan kepala daerah dari masa kampanye sampai selesainya pemilihan kepala daerah 2017. Dukungan terhadap kolom kosong merupakan gerakan baru mengingat hadirnya kolom kosong dalam Pilkada merupakan mekanisme baru dalam Pilkada. Maka menurut sejarah perkembangannya, gerakan sosial yang dilakukan AKDPP merupakan gerakan sosial baru.

C. Strategi AKDPP Sebagai Gerakan Sosial Dalam Pilkada Pati 2017

Gerakan sosial dalam mencapai tujuan yang diinginkan memiliki berbagai strategi. Menurut Suharko (Martono, 2016) strategi yang dapat digunakan gerakan sosial biasanya didasarkan pada penilaian terhadap konteks atau latar politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang dibidik, dan kekuatan, serta sumber daya yang dimiliki organisasi gerakan sosial. Ada empat strategi yang dapat digunakan gerakan sosial, yaitu: *Low profile strategy*, strategi pelapisan, advokasi, dan keterlibatan kritis.

Pertama adalah *low profile strategy*. Menurut Fisher (Martono, 2016), strategi ini dinamakan “isolasi politik” yang secara khusus sesuai dengan konteks politik yang efektif dan represif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan yang otoritarian. Aktor gerakan dalam hal ini secara sadar memutuskan untuk mengisolasi diri atau menghindari hubungan

dengan agen-agen negara. Ruang untuk mengisolasi diri biasanya ditemukan di tingkat lokal tempat aktor berbasis komunitas aktif dalam rangka mengembangkan atau mengorganisasi kelompok-kelompok sosial berdasarkan sumberdaya lokal.

Kedua adalah strategi pelapisan (*layering*). Strategi ini dikemukakan oleh flowler. Strategi ini mirip dengan strategi pertama. Menurut Fowler (Martono, 2016), strategi ini sangat sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. Pelapisan merupakan pengembangan penyediaan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisi metode dan aktifitas yang berorientasi pemberdayaan dan tranformasi sosial. Dengan melakukan strategi ini, organisasi gerakan sosial dapat menghindari diri dari aksi dan intervensi langsung dari pihak lawan.

Ketiga adalah strategi advokasi. Strategi ini sering disebut juga dengan strategi pendampingan, yang merupakan strategi utama yang sering digunakan kalangan LSM. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan-perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumberdaya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan, dll.

Terakhir adalah strategi keterlibatan kritis. Strategi ini merupakan strategi yang mengombinasikan strategi advikasi dengan strategi kerjasama ketika menghadapi pemerintah atau agen-agen resmi negara (misalnya: parlemen, badan yudikatif, dan militer). Meskipun kerja sama antra LSM dengan pemerintah lebih lazim dalam aktifitas penyediaan

pelayanan umum, namun dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik, LSM dapat mengkombinasikan strategi kerjasama dengan advokasi.

Dalam gerakan yang dilakukan oleh AKDPP, penulis melihat ada beberapa konteks yang perlu dilihat untuk menyimpulkan bentuk strategi gerakan sosial yang digunakan oleh AKDPP.

AKDPP dalam gerakannya mendukung kotak kosong bersifat inklusif terhadap semua elemen masyarakat yang ingin bergabung dalam gerakan. Sikap inklusifitasnya tersebut menyatakan bahwa AKDPP tidak melakukan isolasi diri atau menghindari hubungan dengan agen-agen negara. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya partai politik yakni Partai Nasional Demokrasi yang turut bekerjasama dengan AKDPP karena mempunyai kesamaan tujuan dalam menghadapi momentum Pilkada Kabupaten Pati 2017. Dengan aktivitas kerelawanan dari masyarakat yang bergabung ke dalam AKDPP yang sangat inklusif, tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan dengan disusupinya oleh kepentingan aktor politik yang turut serta mengkawal kegiatan AKDPP. Kepentingan aktor politik yang dimaksud adalah upaya mobilisasi massa yang dipersiapkan untuk memperoleh dukungan dalam menghadapi Pilkada pada periode berikutnya jika Pilkada serentak february 2017 di Kabupaten Pati dimenangkan oleh kolom kosong. Masyarakat akan menjadi objek mobilisasi suara karena kekecewaan calon peserta Pilkada yang gagal maju dalam kontestasi. Namun AKDPP menyadari bahwa upaya yang dilakukan dengan satu tujuan tetapi berbeda kepentingan itu pasti tidak lepas dari intervensi oleh kepentingan lain asalkan kepentingan

itu tidak menciderai tujuannya, AKDPP menerima itu. Atas dasar prinsip musuh lawanmu adalah temanmu.

Munculnya AKDPP dilatarbelakangi oleh keprihatinan oleh sekelompok masyarakat pati terhadap Pilkada yang hanya menghadirkan satu pasang calon yakni calon petahana, ketidaksetujuan terhadap sosok calon petahana, dan adanya pemahaman yang salah di masyarakat mengenai Pilkada dengan satu pasang calon. Sehingga yang menjadi tujuan AKDPP adalah memenangkan kotak kosong sebagai strategi untuk menghadirkan pasangan calon lain dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan perubahan di Kabupaten Pati ke arah yang lebih baik, dalam momentum Pilkada ini dengan mengakawal hak-hak suara masyarakat yang tidak setuju dengan calon petahana.

Karena kolom kosong adalah suara alternatif dan tidak mempunyai sosok, masyarakat yang tidak setuju dengan calon petahana berinisiatif membentuk gerakan pendampingan terhadap kolom kosong. Pendampingan dilakukan oleh AKDPP terhadap kolom kosong dengan berbagai bentuk. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan kampanye mengenai Pilkada dan kolom kosong dengan berbagai cara, melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan, sampai melakukan gugatan terhadap hasil Pilkada. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Dengan sikap mengajukan gugatan hukum, sebagai bentuk *civil society* yang teraktualisasi dalam aksi menjadi sebuah gerakan sosial,

memperlihatkan bahwa AKDPP sadar dengan aturan hukum yang berlaku. Aksi yang dilakukan relawan ini merupakan bagian kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Maksudnya, AKDPP mengaktualisasikan gerakan melalui pelayanan hukum dalam bentuk advokasi, pengorganisasian yang lebih mapan dilakukan mewakili konstituen pendukung kotak kosong sebagai suara yang sah di dalam sistem demokrasi pemilihan dalam konteks pilkada serentak 2017 yang menghadirkan kotak kosong sebagai alternatif pilihan.

Dari pemaparan diatas, penulis melihat bahwa gerakan yang dilakukan AKDPP tidak memutuskan untuk melakukan isolasi diri atau menghindari hubungan dengan agen-agen negara seperti yang dilakukan dalam *low profile strategy* dan strategi pelapisan (*layering*). Lalu AKDPP juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diintervensi oleh kepentingan aktor politik lain atau pihak lawan. Dan AKDPP melakukan pendampingan, yakni terhadap suara kolom kosong dalam Pilkada pati 2017 yang dilakukan dari sosialisasi sampai melakukan gugatan terhadap hasil Pilkada. Kegiatannya mendesak perubahan-perubahan sosial seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis dalam Pilkada di Kabupaten Pati. Hal tersebut memenuhi ciri-ciri sebagai strategi advokasi.

Masyarakat yang memberikan respon adanya calon tunggal pada momentum Pilkada di Serentak di Kabupaten Pati ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendukung agenda utama masyarakat yang sebelumnya pernah melakukan aksi perlawanan. Seperti masyarakat yang mempunyai latar belakang sebagai aktivis penolak penambangan di pegunungan kendeng, mengingat peran

calon petahana dalam aktivitas tersebut yang dinilai tidak pro terhadap lingkungan dan masyarakat kecil. Melihat isu adanya calon tunggal yang notabene calonnya adalah petahana, elemen masyarakat yang sebelumnya melakukan protes terhadap aktivitas penambangan di Kendeng memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan deligitimasi calon petahana melalui pilihan politik alternatif yakni kolom kosong yang disediakan oleh sistem pemilihan yang baru. Dalam momentum ini kelompok tersebut membawa isu yang sama untuk menciptakan konstituen baru dan menggerakkan perlawanan.

Keberadaan gerakan-gerakan sosial yang telah ada sebelumnya di Kabupaten Pati seperti gerakan tolak semen dan sebagainya memberikan andil pada menguatnya gerakan penolakan terhadap calon tunggal. Hal ini juga senada dengan hasil riset dari David Efendi (2017) bahwa keberadaan kelompok paguyuban atau organisasi lokal yang sudah terbentuk lama memberikan kekuatan pada keberadaan gerakan sosial baru dalam konteks gerakan penolakan terhadap wacana pemilihan gubernur langsung di Yogyakarta.